



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO OPERASIONAL OPD

2024

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN KLAMBU
Jalan Raya Klambu-Kudus No 30 Telp. (0292) 4274002
Kode Pos 58154**

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara; dan
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

1. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2024 ini diprioritaskan untuk mencapai kualitas pencapaian tujuan organisasi, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan didukung pengendalian intern yang memadai.

2. Organisasi Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

a. Struktur Organisasi

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, dan Tata Kerja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, bahwa susunan organisasi Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Kesejahteraan rakyat;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Desa.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Camat Klambu Kabupaten Grobogan mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Camat Klambu mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Perbup;
- d. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
- g. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;

- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang – Undangan.

c. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati – Wakil Bupati Grobogan terpilih Tahun 2021 - 2026, ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026 adalah:

"Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya"

Untuk mendukung visi Kepala Daerah, Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan melaksanakan **misi ke-4** yaitu **Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik.**

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran
Misi 4: Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni b. Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan d. Meningkatnya kualitas manajemen ASN

Berdasarkan telaahan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan 2021 - 2026 tersebut, maka Kecamatan Klambu menekankan program dan kegiatan guna mendukung arah pembangunan kabupaten tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

Dalam RENSTRA 2021-2026, Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja sesuai fungsi organisasi untuk mencapai misi ke-4 Bupati Grobogan dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Tujuan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Klambu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan terpadu Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	78	80	83	85	87
		Terciptanya kondisi pelayanan prima di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	80	83	85	87
		Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Sakip	B	B	B	BB	BB

Sasaran organisasi merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dengan kurun waktu tertentu, sehingga harus disusun secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

3. Dasar Hukum

Dasarpenyusunan Rencana Tindak Pengendalian adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- e. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan;
- f. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 35 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

4. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

5. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2024, pada periode Renja OPD. Rencana tindak pengendalian Operasional OPD dilaksanakan 1 tahun sekali.

6. Manfaat

Keberadaan Rencana Tindak Pengendalian ini diarahkan untuk menjadi landasan/dasar dalam hal:

- a. Pengembangan SPIP secara menyeluruh;
- b. Perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP;

- c. Pendokumentasian, pemantauan, dan pengukuran perkembangan/progres penyelenggaraan SPIP.

B. Sekilas tentang SPIP

1. Pengertian

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan konsep pengendalian yang dirancang untuk dapat diimplementasikan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Unsur-Unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk:

- 1) Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;

- 2) Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas:

- 1) Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu;
- 2) Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko;
- 3) Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing*.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikanyang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi Terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.

Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka seluruh unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dengan aktivitas organisasi, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan

berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB II

URAIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN

A. Penerapan SPIP di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, seluruh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Dalam kaitan dengan pengendalian intern tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menerbitkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 35 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

Sebagai langkah awal penyusunan Rencana Tindak Pengendalian, Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP telah melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, melalui kegiatan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern yang telah ada dan menemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada/terpasang serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik. Dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut antara lain dibahas materi tentang:

1. Metodologi penilaian kondisi lingkungan pengendalian dan teknis penyusunan rencana penguatan lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation*;
2. Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

Hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern. Rencana Tindak Pengendalian Intern ini merupakan *action plan* untuk menindaklanjuti hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), yang terdiri atas dua paket rencana aksi, yaitu:

- a. Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian;
- b. Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi.

B. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan

1. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2024, diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai

4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Kurang Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai
7	Perwujudan Peran APIP Yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi.

Hasil penilaian lingkungan pengendalian diperoleh dari rekapitulasi servei kuesioner *Control Environment Evaluation (CEE)* kepada 6 (enam) responden di Lingkungan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Dari delapan sub unsur yang dilakukan evaluasi didapatkan 3 sub unsur lingkungan pengendalian di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan yang "KURANG MEMADAI". Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation*, menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki, yaitu:

- a. Komitmen Terhadap Kompetensi
 - Kompetensi beberapa pegawai terhadap tupoksi masih kurang optimal.
- b. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
 - Reviu berjenjang yang belum dilaksanakan secara optimal
- c. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
 - Belum adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko

- Instansi tidak mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM

Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian secara lengkap disajikan di **Lamp RTP Lipeng** pada kertas kerja KK_MR Operasional OPD.

C. Risiko dan Kegiatan Pengendalian Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

1. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan mempunyai 1 (satu) Tujuan Instansi yaitu **Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**. Pada tahun 2024, Rencana Tindak Pengendalian yang disusun Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

2. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen.

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah ditetapkan besaran skala risiko dan pengendalian risiko, sebagai berikut:

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu :

a. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak Risiko. Sebagai contoh kategori dampak Risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan/ Sangat besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
Signifikan/ Besar	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
Kurang signifikan/ Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan
Tidak signifikan/ Sangat kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan menggunakan operasionalisasi dampak yang lebih rinci sebagai berikut :

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Keuangan	Keuangan	Hukum
Sangat Tinggi	4	kerugian sangat besar	kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	negatif, tersebar luas di banyak media	pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	3	kerugian besar	kegiatan sangat terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar luas di beberapa media nasional/ lokal	pelanggaran serius, sanksi tertulis
Rendah	2	kerugian cukup besar	kegiatan terhambat kurang efisien	negatif, terdapat pemberitaan	pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Sangat Rendah	1	kerugian kecil, kurang material	ada hambatan kegiatan, namun tertangani	ada pemberitaan negatif, namun tidak material	pelanggaran biasa, sanksi teguran

b. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya Risiko. Sebagai contoh kategori probabilitas Risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/ sangat sering	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan besar/ Sering terjadi	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 41-70% atau 4 sd 7 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan kecil/ Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11-40% atau 1 sd 4 kali dalam 10 tahun)

Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0-10% atau 1 kali dalam 10 tahun)
---------------	---	---

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan menggunakan operasionalisasi probabilitas yang lebih rinci sebagai berikut :

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Sangat Sering	4	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >75%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 Tahun
Sering	3	Sering terjadi, (probabilitas 50-75%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 Tahun
Jarang	2	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas 20-50%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5-10 Tahun
Sangat Jarang	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas <20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10-20 Tahun

Untuk lebih memudahkan penentuan Risiko prioritas dan *acceptable/unacceptable risk*, dapat pula digunakan matriks Risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas Risiko serta kriteria level Risiko/*risk appetite* yang telah ditentukan. Kategori nilai Risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan	Kecil	Besar	Sangat signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	4	6	10	14	16
	Kemungkinan besar	3	4	8	11	15
	Kemungkinan kecil	2	2	7	9	13
	Sangat jarang	1	1	3	5	12

Keterangan :	Sangat rendah	Rendah	Tinggi	Sangat tinggi
---------------------	----------------------	---------------	---------------	----------------------

- c. Penetapan area atau bidang yang menjadi Risiko prioritas yang memerlukan penanganan/respon Risiko Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh selera Risiko atau preferensi manajemen Pemerintah Daerah. Dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (*orange*) merupakan area yang memiliki sisa Risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi. Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya, sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima.

3. RTP Hasil Identifikasi Risiko

Rencana Tindak Pengendalian atas hasil identifikasi Risiko Operasional OPD, adalah sebagai berikut :

Risiko Operasional Organisasi:

Tujuan Instansi : Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

Sasaran : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat

Program :

1. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten /Kota

Kegiatan :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Administrasi umum perangkat daerah

No	Risiko Prioritas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
1	2	3	4
1	Partisipasi Desa pada kegiatan Lomba administrasi Desa tingkat Kabupaten masih kurang	Tidak efektif	Melaksanakan Bintek Kelembagaan dan Penyusunan Administrasi bagi Perangkat Desa
2	Masih Rendahnya usulan DURKP Desa yang diakomodir di Tingkat Kabupaten	Tidak efektif	Melakukan usulan pada anggota DPRD saat reses untuk dijadikan pikir di wilayah kecamatan Klambu

Form Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2024 secara lengkap disajikan dalam **Lamp 7 RTP atas Hasil Identifikasi Risiko** pada kertas kerja KK_MR Operasional OPD.

D. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

Risiko Operasional Organisasi:

Tujuan Instansi : Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

Sasaran : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat

Program :

- 1. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
- 2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten /Kota**

Kegiatan :

- 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
- 2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Administrasi umum perangkat daerah**

No.	Risiko	Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk/Sarana Pengkomunikasian
1	2	3	4
1	Partisipasi Desa pada kegiatan Lomba administrasi Desa tingkat Kabupaten masih kurang	Melaksanakan Bintek Kelembagaan dan Penyusunan Administrasi bagi Perangkat Desa	Surat Undangan

2	Masih Rendahnya usulan DURKP Desa yang diakomodir di Tingkat Kabupaten	Melakukan usulan pada anggota DPRD saat reses untuk dijadikan pokir di wilayah kecamatan Klambu	Surat, Proposal Kegiatan
---	--	---	--------------------------

Rancangan Informasi dan Komunikasi ini idealnya dilaporkan perkembangannya secara rutin, minimal setiap 6 bulan agar bila terdapat kendala yang muncul dapat segera dicari solusi dan pemecahan masalahnya. Laporan minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

- Media/Bentuk/Sarana Pengkomunikasian yang digunakan;
- Penyedia Informasi/Penanggung jawab tindak lanjut;
- Penerima informasi/tindak lanjut;
- Waktu pelaksanaan; serta
- Realisasi rencana tindak lanjut.

Rincian Rancangan Informasi dan Komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam **Lamp 8 Infokom** pada kertas kerja KK_MR Operasional OPD.

E. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

Pemantauan dan Evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan Evaluasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

Risiko Operasional Organisasi:

Tujuan Instansi : Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

Sasaran : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat

Program :

1. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten /Kota

Kegiatan :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Administrasi umum perangkat daerah

No	Risiko	Pengendalian yang Direncanakan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan
1	2	3	4
1	Partisipasi Desa pada kegiatan Lomba administrasi Desa tingkat Kabupaten masih kurang	Melaksanakan Bintel Kelembagaan dan Penyusunan Administrasi bagi Perangkat Desa	Surat
2	Masih Rendahnya usulan DURKP Desa yang diakomodir di Tingkat Kabupaten	Melakukan usulan pada anggota DPRD saat reses untuk dijadikan pokir di wilayah kecamatan Klambu	Surat

Rincian pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah yang akan dilakukan tertuang dalam **Lamp 9 Pemantauan** pada kertas kerja KK_MR Operasional OPD.

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing unit kerja SKPD pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan.

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah bisa dilaksanakan oleh Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan (bagi SKPD), atau oleh pihak luar seperti Kecamatan Klambu. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif. Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian. Beberapa hal yang harus disiapkan dalam proses ini adalah:

- Bentuk pengendalian yang direncanakan;
- Bentuk/metode pemantauan yang diperlukan;

- Penanggung jawab pemantauan;
- Prosedur pemantauan;
- Waktu pelaksanaan.

3. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap SKPD memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Asisten Setda Grobogan selaku Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Kabupaten Grobogan.

BAB III

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Klambu, 16 November 2023



CAMAT KLAMBU
KECAMATAN
KLAMBU
GROBOGAN

RUSTAMAJI, S.STP, M.SI
Pembina, IV/a
NIP. 198710132006021002

**REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**

NO.	PERTANYAAN/ KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN						Modus	SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6		
a	b	c							d
A. PENEKAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA MEMADAI								3	Memadai
1	Pegawai mndapat pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Pemerintah Daerah telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai)	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	3	3	4	2	2	3	Memadai
B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI								2	Kurang Memadai
1	Standar kompetensi Setiap pegawai/posisi jabatan telah Ditentukan	1	2	2	3	3	2	2	Kurang Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	2	3	2	2	2	2	Kurang Memadai
3	Pemerintah Daerah telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan komptensi pegawai	3	2	3	3	2	2	3	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	2	3	2	3	2	1	2	Kurang Memadai
C KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								3	Memadai
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	3	3	4	3	1	3	Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan	3	3	4	3	3	2	3	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	4	3	4	2	3	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah daerah	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis Pemerintah daerah telah dijabarkan ke dalam sasaran Perangkat daerah dan tingkat operasional Perangkat daerah	2	3	4	2	2	2	2	Kurang Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	3	2	3	1	3	Memadai
8	Adanya transparansi dan ketetapan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	4	1	3	1	3	Memadai
D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN								3	Memadai
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	4	3	4	2	3	Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	2	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3	3	3	3	4	2	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	4	3	3	2	3	Memadai
E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT								2	Kurang Memadai
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	2	3	3	3	1	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab Dilaksanakan secara tepat	2	2	3	3	2	2	2	Kurang Memadai

NO.	PERTANYAAN/ KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN						Modus	SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6		
3	Kewenangan direviu secara periodik	3	2	3	2	1	2	2	Kurang Memadai
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA							2	Kurang Memadai
1	Pemerintah daerah telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	2	3	3	2	3	2	2	Kurang Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	2	3	3	1	3	Memadai
3	Instansi pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	2	3	3	2	3	Memadai
4	Pemerintah daerah telah menginternalisasi budaya sadar risiko	2	3	2	3	2	1	2	Kurang Memadai
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	2	3	2	2	1	2	Kurang Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	3	3	3	1	3	Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	2	1	2	2	2	2	Kurang Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF							3	Memadai
1	Inspektorat daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodic	3	3	3	3	3	2	3	Memadai
2	Inspektorat melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	4	2	3	Memadai
3	Inspektorat memberikan layanan fasilitas penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	4	3	3	3	4	3	3	Memadai
4	APIP telah Melakukan pengawasan berbasis risiko	4	3	3	4	3	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT							3	Memadai
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan opsional telah terbangun	4	4	3	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	4	3	3	3	3	3	Memadai

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

R1,R2,R3,R4,R5,R6,dst adalah responden1, resmponden2, responden3, dst

Ket jawaban:

1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun

2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten

3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan

4 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

Kesimpulan tiap pertanyaan:

"Memadai", apabila modulus jawaban responden adalah 3 atau 4

"Kurang Memadai" apabila modulus jawaban responden adalah 1 atau 2 kesimpulan sub Unsur lingkungan pengendalian:

Kesimpulan tiap sub unsur (A-H):

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

**CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Kabupaten Grobogan**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Grobogan			
Tahun Penilaian : 2024			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Laporan Hasil Reviu RKA-SKPD Kecamatan Klambu Th. Anggaran 2024	Indikator Capaian Program Kegiatan di RKA-SKPD Kecamatan Klambu Tahun Anggaran 2024 belum semuanya diuraikan dengan jelas. Dan beberapa Target Kinerja tidak sesuai dengan jumlah rincian belanja.	Kepemimpinan yang Kondusif
2	Laporan Hasil Pendampingan Atas Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2024	Pada kertas kerja CEE berdasarkan dokumen (K.K.1.b) telah disusun namun pada form isian sumber data, uraian kelemahan dan klasifikasi diisi nihil.	Kepemimpinan yang Kondusif
		Beberapa narasi dan korelasi dalam Kertas Kerja antara sebab dan dampak masih kurang tepat	
		Indikator dan Target Program dokumen (K.K.2.C dan K.K.3.C) belum diisi	

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Grobogan
Tahun Penilaian : 2024

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	-
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai	Kompetensi beberapa pegawai terhadap tupoksi masih kurang optimal	Kurang Memadai	Kompetensi beberapa pegawai terhadap tupoksi masih kurang optimal	Kurang Memadai	Kekurangan SDM yang kompeten dan masih mengandalkan satu atau dua orang disetiap teknis kegiatan maupun ketika menyelesaikan suatu permasalahan
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	-
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	-
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Kurang Memadai	Reviu berjenjang yang belum dilaksanakan secara optimal	Kurang Memadai	Reviu berjenjang yang belum dilaksanakan secara optimal	Kurang Memadai	Dalam menyusun laporan belum dilakukan penelitian secara optimal dimana PA/KPA telah memiliki id/paswod di SIPD dan disusun oleh staf yang menanganinya
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai	Kinerja hanya tertumpu beberapa pegawai/staf tertentu saja.	Kurang Memadai	Belum adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko	Kurang Memadai	Belum adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)
		Kurang Memadai		Kurang Memadai	Instansi tidak mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Kurang Memadai	Instansi tidak mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	-
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	-

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP
atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP atas CEE)**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Grobogan					
Tahun Penilaian : 2024					
No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	B	C	D	E	F
II Komitmen Terhadap Kompetensi					
1	Kompetensi beberapa pegawai terhadap tupoksi masih kurang optimal	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM	CAMAT KLAMBU	Triwulan IV 2024	
v Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat					
1	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab dilaksanakan belum tepat	Passwod dan ID SIPD tidak boleh diberikan ke pegawai lain dan melaksanakan tugas sesuai tugas fungsinya	CAMAT KLAMBU	Triwulan III 2024	
VI Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM					
1	Belum adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko	Membuat regulasi sekaligus sistem pemberian reward dan punishment atas pengelolaan risiko	CAMAT KLAMBU	Triwulan III 2024	
2	Instansi tidak mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Bapeda dan BPPKAD	Triwulan IV 2024	

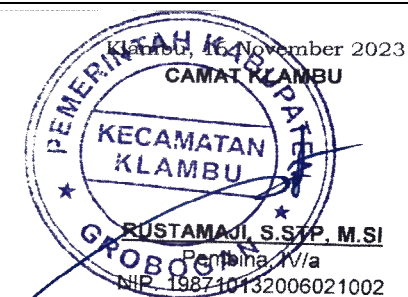
Penetapan Konteks Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Tahun Penilaian	: 2024
Periode yang dinilai	: RPJMD (Tahun 2021-2026)
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan
Perangkat Daerah yang Dinilai	: Kecamatan Klambu

Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase lembaga masyarakat aktif</i>	100%	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</i>	100 Keluarga	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</i>	100 Keluarga
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan</i>	100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan</i>	100%	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	100 Orang
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase desa dengan tertib administrasi</i>	100%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase desa dengan tertib administrasi</i>	100%	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	9 Dokumen
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	<i>Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP</i>	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen

Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	12 Orang/bulan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu</i>	100%	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	25 Paket
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	8 Paket
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket
						Penyediaan Bahan / Material	<i>Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan</i>	3 Paket
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100%	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	3 Unit
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	450 Laporan
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	100 Laporan
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	3 Laporan

Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Prosentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	2 Unit
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	2 Unit
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	20 Unit
Program, Kegiatan, dan Keluaran / Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN							
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan KeluargaTingkat Kecamatan dan Kelurahan Keluaran : Fasilitasi Lomba PKK, Konvergensi stunting							
	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM							
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Keluaran : Peringatan Hari Jadi dan HUT RI							
3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA								
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Keluaran : Lomba Administrasi Desa								
4. PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA								
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluaran : MUSRENBANGCAM								



No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Risiko				Sebab		C/ UC	Dampak	
							Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan</i>	100%	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	100 Orang	Pelaksanaan	Partisipasi masyarakat dalam merayakan Peringatan Hari Jadi dan HUT RI masih kurang	ROO.24.39.31.03	CAMAT, KASI Trantib, dan KASI TAPEM	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rasa Nasionalisme	Eksternal	C	Peringatan Hari jadi dan HUT RI kurang meriah dan jumlah masyarakat yang menyaksikan sedikit	Masyarakat
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase desa dengan tertib administrasi</i>	100%												
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase desa dengan tertib administrasi</i>	100%	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	9 Dokumen	Pelaksanaan	Partisipasi Desa pada kegiatan Lomba administrasi Desa tingkat Kabupaten masih kurang	ROO.24.39.31.04	KASI TAPEM	Kurangnya integritas Perangkat Desa dalam menyusun administrasi Desa	Internal	C	Jumlah partisipasi desa dalam lomba administrasi sedikit	Kecamatan Klambu dan Desa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	<i>Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP</i>	100%												
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	Pelaksanaan	Masih Rendahnya usulan DURKP Desa yang diakomodir di Tingkat Kabupaten	ROO.24.39.31.05	CAMAT dan KASI PMD	Pemerintah daerah menitikberatkan pada Program Skala Prioritas dan anggaran terbagi pada berbagai program	Eksternal	UC	Pembangunan infrastruktur Kabupaten yang ada di Desa tidak maksimal	Kecamatan Klambu, Desa, dan Masyarakat

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Risiko				Sebab		C/ UC	Dampak	
							Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</i>	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	12 Orang /bulan	Pelaksanaan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak mencukupi selama satu tahun	ROO.24.39.31.06	Kasubag Keuangan	Tidak di anggarkannya Jabatan Kosong di Penetapan	Eksternal	UC	Jumlah anggaran gaji tidak terbayar	ASN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu</i>	100%	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	25 Paket	Pelaksanaan	Barang tidak sesuai spesifikasi	ROO.24.39.31.07	CAMAT	Penyedia kurang teliti dengan spesifikasi barang	Eksternal	UC	Pemanfaatan barang kurang maksimal	Kecamatan Klambu
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	8 Paket	Pelaksanaan	Barang tidak sesuai spesifikasi	ROO.24.39.31.08	CAMAT	Penyedia kurang teliti dengan spesifikasi barang dan jumlah daya yang dibutuhkan	Eksternal	UC	Daya Listrik tidak mampu memenuhi kebutuhan	Kecamatan Klambu
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	Pelaksanaan	Rapat tidak berjalan optimal	ROO.24.39.31.09	CAMAT	Peserta rapat melebihi undangan yang di tetapkan	Eksternal	UC	Banyak peserta rapat tidak mendapatkan Konsumsi	Kecamatan Klambu
				Penyediaan Bahan / Material	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	3 Paket	Pelaksanaan	Barang tidak sesuai spesifikasi	ROO.24.39.31.10	CAMAT	Penyedia kurang teliti dengan spesifikasi barang	Eksternal	UC	Pemanfaatan barang kurang maksimal	Kecamatan Klambu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	Pelaksanaan	Undangan rapat sering diwakilkan	ROO.24.39.31.11	CAMAT	Jadwal Rapat sering bersamaan agenda lain	Eksternal	UC	Materi rapat tidak tersampaikan dengan optimal	Kecamatan Klambu
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100%	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	3 Unit	Pelaksanaan	Barang memenuhi TKDN tapi tidak sesuai spesifikasi	ROO.24.39.31.12	CAMAT	Spesifikasi tidak sesuai kebutuhan	Internal	C	Barang cepat rusak	Kecamatan Klambu

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Risiko				Sebab		C/ UC	Dampak	
							Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	450 Laporan	Pelaksanaan	Belanja Materai tidak maksimal	ROO.24.39.31.13	CAMAT	Belanja dengan non tunai	Internal	C	Banyak Materai yang tidak digunakan	Kecamatan Klambu
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	100 Laporan	Pelaksanaan	Bandwidth Internet kurang maksimal	ROO.24.39.31.14	CAMAT	Spesifikasi barang tidak memenuhi standar	Internal	C	Terganggunya kegiatan pelayanan	Kecamatan Klambu
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	3 Laporan	Pelaksanaan	Pelayanan kurang maksimal	ROO.24.39.31.15	CAMAT	Belum diterapkannya Standar Pelayanan dengan maksimal	Internal	C	Nilai IKM kurang maksimal	Masyarakat dan Kecamatan Klambu
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	2 Unit	Pelaksanaan	Biaya Pemeliharaan membengkak	ROO.24.39.31.16	CAMAT	Tingginya Intensitas pemakaian	Internal	C	Kendaraan sering rusak	Kecamatan Klambu
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	Pelaksanaan	Sarana dan Prasarana Kantor belum sepenuhnya sesuai standar	ROO.24.39.31.17	CAMAT	Terbatasnya lahan tempat untuk gedung baru	Internal	C	Masyarakat Kurang nyaman dalam menerima pelayanan	Kecamatan Klambu
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	20 Unit	Pelaksanaan	Sarana dan Prasarana Kantor perlu pemeliharaan	ROO.24.39.31.18	CAMAT	Terbatasnya Prioritas Rehabilitasi setiap tahunnya	Eksternal	UC	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	Masyarakat

Kertas Kerja
Proses FGD untuk Hasil Analisis Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten Grobogan
Nama OPD	: Kecamatan Klambu
Tahun Penilaian	: 2024
Periode yang dinilai	: RPJMD (Tahun 2021-2026)
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
Sasaran Strategis OPD	: Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten /Kota
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko														Skala Risiko (f)
			Skala Dampak*)							Skala Kemungkinan *)							
a	b	c	R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus Dampak (d)	R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus Kemungkinan (e)	f=dxe
I	Risiko Operasional OPD																
1	Pencapaian target Program Pokok PKK belum optimal	ROO.24.39.31.01	3	3	2	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2	7
2	Penurunan angka Stunting belum maksimal	ROO.24.39.31.02	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	7
3	Partisipasi masyarakat dalam merayakan Peringatan Hari Jadi dan HUT terbatas	ROO.24.39.31.03	2	3	2	2	3	2	2	1	2	2	1	2	1	1	3
4	Partisipasi Desa pada kegiatan Lomba administrasi Desa tingkat Kabupaten masih kurang	ROO.24.39.31.04	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	11
5	Masih Rendahnya usulan DURKP Desa yang diakomodir di Tingkat Kabupaten	ROO.24.39.31.05	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	15

Formulir Hasil Analisis Risiko

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten Grobogan
Nama OPD	: Kecamatan Klambu
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan

No.	"Risiko" yang teridentifikasi	Kode Risiko	Analisi Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f
I	Risiko Operasional OPD				
1	Pencapaian target Program Pokok PKK belum optimal	ROO.24.39.31.01	2	2	7
2	Penurunan angka Stunting belum maksimal	ROO.24.39.31.02	3	3	7
3	Partisipasi masyarakat dalam merayakan Peringatan Hari Jadi dan HUT terbatas	ROO.24.39.31.03	2	1	3
4	Partisipasi Desa pada kegiatan Lomba administrasi Desa tingkat Kabupaten masih kurang	ROO.24.39.31.04	2	2	11
5	Masih Rendahnya usulan DURKP Desa yang diakomodir di Tingkat Kabupaten	ROO.24.39.31.05	4	3	15

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai form 3c

Kolom c diisi dengan kode risiko form 3c

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan modus skala dampak yang diberikan peserta FGD

Kolom e diisi dengan diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan modus kemungkinan yang diberikan peserta FGD

Kolom f diisi dengan Skala Risiko sesuai modus dampak dan modus kemungkinannya

Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Grobogan
Nama OPD	: Kecamatan Klambu
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Operasional Perangkat Daerah					
1	Partisipasi Desa pada kegiatan Lomba administrasi Desa tingkat Kabupaten masih kurang	ROO.24.39.31.04	11	KASI TAPEM	Kurangnya integritas Perangkat Desa dalam menyusun administrasi Desa	Jumlah partisipasi desa dalam lomba administrasi sedikit
2	Masih Rendahnya usulan DURKP Desa yang diakomodir di Tingkat Kabupaten	ROO.24.39.31.05	15	CAMAT DAN KASI PMD	Pemerintah daerah menitikberatkan pada Program Skala Prioritas dan anggaran terbagi pada berbagai program	Pembangunan infrastruktur Kabupaten yang ada di Desa tidak maksimal

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas sesuai form 4

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai form 4

Kolom d diisi dengan skala risiko sesuai form 4

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai form 3c

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai form 3c

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan form 3c

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Grobogan
Nama OPD	: Kecamatan Klambu
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
Risiko Operasional Perangkat Daerah							
1	Partisipasi Desa pada kegiatan Lomba administrasi Desa tingkat Kabupaten masih kurang	ROO.24.39.31.04	Monitoring dan Evaluasi administrasi Pemerintah Desa	Tidak efektif	Melaksanakan Bintek Kelembagaan dan Penyusunan Administrasi bagi Perangkat Desa	KASI TAPEM	Triwulan II 2024
2	Masih Rendahnya usulan DURKP Desa yang diakomodir di Tingkat Kabupaten	ROO.24.39.31.05	Koordinasi dengan Bapeda dan BPPKAD	Tidak efektif	Melakukan usulan pada anggota DPRD saat reses untuk dijadikan pokir di wilayah kecamatan Klambu	KASI PMD	Triwulan I 2024

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Grobogan
Nama OPD	: Kecamatan Klambu
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
I	RTP LINGKUNGAN PENGENDALIAN						
1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM	Surat	Kecamatan Klambu	CAMAT KLAMBU	Triwulan IV 2024		
2	Passwod dan ID SIPD tidak boleh diberikan ke pegawai lain dan melaksanakan tugas sesuai tugas fungsinya	Surat/ Rapat	Kecamatan Klambu	CAMAT KLAMBU	Triwulan III 2024		
3	Membuat regulasi sekaligus sistem pemberian reward dan punishment atas pengelolaan risiko	SK Penugasan	Kecamatan Klambu	CAMAT KLAMBU	Triwulan III 2024		
4	Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Surat	Kecamatan Klambu	SETDA	Triwulan IV 2024		
II	RTP OPERASIONAL OPD						
1	Melaksanakan Bintek Kelembagaan dan Penyusunan Administrasi bagi Perangkat Desa	Surat Undangan	Kecamatan Klambu	Desa	Triwulan II 2024		
2	Melakukan usulan pada anggota DPRD saat reses untuk dijadikan pokir di wilayah kecamatan Klambu	Surat, Proposal kegiatan	Kecamatan Klambu	Setwan DPRD	Triwulan I 2024		

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Grobogan
Nama OPD	: Kecamatan Klambu
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
I	RTP LINGKUNGAN PENGENDALIAN					
1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM	Surat	CAMAT KLAMBU	Triwulan III 2024		
2	Passwod dan ID SIPD tidak boleh diberikan ke pegawai lain dan melaksanakan tugas sesuai tugas fungsinya	Surat/ Rapat	CAMAT KLAMBU	Triwulan IV 2024		
3	Membuat regulasi sekaligus sistem pemberian reward dan punishment atas pengelolaan risiko	SK Penugasan	CAMAT KLAMBU	Triwulan IV 2024		
4	Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Surat	SETDA	Triwulan IV 2024		
II	RTP OPERASIONAL OPD					
1	Melaksanakan Bintek Kelembagaan dan Penyusunan Administrasi bagi Perangkat Desa	Surat	CAMAT KLAMBU	Triwulan IV 2024		
2	Melakukan usulan pada anggota DPRD saat reses untuk dijadikan pokir di wilayah kecamatan Klambu	Surat, Proposal kegiatan	CAMAT KLAMBU	Triwulan III 2024		

REGISTER RISIKO KECURANGAN (FRAUD)

KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN

1	Tahapan/Program/ Kegiatan	RISIKO FRAUD/ KECURANGAN	KEMUNGKINAN SKENARIO FRAUD (Modus)	JENIS RISIKO FRAUD	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB	GEJALA	PENGENDALIAN TERPASANG/ EXISTING CONTROL	Analisis Risiko				Uraian Dampak	Usulan Risk Response/RTP	Timeline/ Monitoring
									K	D	NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Mark Up Data	Penambahan jumlah makan minum pada SPJ Rapat Koordinasi PKK yang lebih banyak dari undangan peserta rapat	Manipulasi	Kecamatan Klambu	Kurangnya kesadaran anggota	Anggaran membengkak	Pembinaan anggota	4	1	6	Rendah	Kerugian Finansial	Pertanggung jawaban Laporan	Per semester
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pungli	Dalam kegiatan Peringatan HUT atau Hari besar Nasional, untuk kelancaran acara, pejabat menarik iuran kepada pihak tertentu dengan besaran yang ditentukan		KASI TRANTIBUM	Terbatasnya Anggaran	Aduan Masyarakat	Penegakan Integritas dan nilai etika, Penambahan anggaran	3	3	11	Tinggi	1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Kecamatan Klambu 3. Dampak Hukum	Penegakan Pakta Integritas	Triwulanan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemerasan /pungli	Saat melaksanakan Pembinaan Administrasi Desa, Pejabat menyalahgunakan wewenang yang berpotensi terjadinya pemerasan/pungli yang bertujuan memperlancar proses pembinaan	Pemerasan	KASI TAPEM	1. Kurangnya integritas, 2. Kurangnya pengendalian,	Aduan Perangkat Desa	Penegakan Integritas dan nilai etika	3	2	8	Rendah	1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Kecamatan Klambu 3. Dampak Hukum	Penegakan Pakta Integritas	Triwulanan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA														
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Gratifikasi	Desa memberikan bingkisan terhadap pihak Kecamatan untuk di akomodirnya Usulan DURKP Desa	Gratifikasi	KASI PMD	1. Kurangnya integritas, 2. Kurangnya pengendalian,	Aduan Masyarakat	Penegakan Integritas dan nilai etika	2	2	7	Rendah	1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Kecamatan Klambu 3. Dampak Hukum	Penegakan Pakta Integritas	Triwulanan

Tahapan/Program/ Kegiatan	RISIKO FRAUD/ KECURANGAN	KEMUNGKINAN SKENARIO FRAUD (Modus)	JENIS RISIKO FRAUD	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB	GEJALA	PENGENDALIAN TERPASANG/ EXISTING CONTROL	Analisis Risiko				Uraian Dampak	Usulan Risk Response/RTP	Timeline/ Monitoring
								K	D	NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Manipulasi data tunjangan anak	Tunjangan anak diatas 22 tahun tidak dilaporkan pemberhentian tunjangan	Manipulasi data	Kasubag Keuangan	1. Tekanan Ekonomi 2. Kurangnya Integritas pegawai	Anggaran tunjangan membengkak	Pedoman pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	2	2	8	Rendah	Kerugian Finansial	Aplikasi untuk tunjangan keluarga	Bulanan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Manipulasi	Pengisian buku kerja Sitapres tidak sesuai dengan kehadiran pegawai di kantor	Manipulasi	Kecamatan Klambu	Kurangnya Integritas pegawai	Pegawai jarang di kantor	Verifikasi Data	4	3	14	Sangat Tinggi	Sasaran kinerja tidak tercapai	Pencermatan dan ketelitian dalam tahap verifikasi data oleh atasan langsung	Harian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Manipulasi data	Pegawai membuat SPJ Rapat yang bersifat fiktif untuk mendapatkan anggaran SPPD	Manipulasi	Kecamatan Klambu	Kurangnya Integritas pegawai	SPPD membengkak	Audit berkala	3	1	4	Rendah	Kerugian Finansial	Cukup dikelola dengan aturan/sop yang ada	Bulanan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Markup HPS Pengadaan	Pegawai mengelembungkan harga satuan ketika menyusun HPS.	Penyalahgunaan Aset	Kecamatan Klambu	Adanya kesempatan yang berwenang sebagai bagian Pengadaan dan menganggap sebagai hal yang wajar dan capaian keuangan dan anggaran dinas.	Kurang banyak melakukan Survey harga sebagai acuan, menggunakan brosur dari salah satu penyedia	1. Pakta Integritas 2. Audit Berkala.	2	2	4	Rendah	1. Kerugian Negara 2. Dampak Hukum 3. Tujuan Program Tidak Tercapai	Cukup dikelola dengan aturan/sop yang ada	Triwulanan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyalahgunaan Aset Dinas untuk kepentingan pribadi	Pemakaian listrik diluar jam kerja untuk kepentingan pribadi	Penyalahgunaan Sarana Penunjang	Kecamatan Klambu	Lemahnya pengawasan dan tidak adanya sikap saling mengingatn tentang pemakaian listrik diluar jam kantor	Tagihan Listrik membengkak	Pengawasan Tagihan Listrik setiap bulan oleh pimpinan	3	2	8	Sedang	Kerugian Finansial	Cukup dikelola dengan aturan/sop yang ada	Bulanan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyalahgunaan Aset Dinas untuk kepentingan pribadi	Pegawai menggunakan aset dinas untuk kepentingan pribadi diluar pekerjaan	Penyalahgunaan Aset	Kecamatan Klambu	Kesempatan sebagai pemegang aset	1. Aset tidak terawat, 2. Aset cepat rusak	1. BA Serah Terima Penggunaan Aset, 2. Daftar pemeliharaan Asset,	2	1	2	Sangat Rendah	Kerugian Finansial	1. Dikelola dengan aturan/sop yang ada, 2. Laporan pelaksanaan pemeliharaan asset	Triwulanan

